

LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT NARKOTIKA
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN
TAHUN 2023



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Narkotika adalah salah satu satuan kerja tingkat Eselon II pada Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 47 tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional. Sementara itu tugas dan fungsi Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, intinya adalah melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Bidang Pemberantasan Prekursor Narkotika dan Psicotropika.

Dalam melaksanakan tugas P4GN tersebut, Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional, penyusunan dan perumusan standar dan prosedur kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan instansi pemerintah terkait, pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Pemetaan, Penyelidikan dan Pemusnahan Ladang Ganja dan Tanaman terlarang lainnya, sebagaimana telah ditetapkan dalam program P4GN.

B. DASAR HUKUM

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dilaksanakan berdasarkan :

1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.

4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
5. Penetapan Kinerja Direktur Narkotika BNN tahun 2023.
6. Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Narkotika T.A.2023.

C. KEDUDUKAN DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan merupakan unsur pelaksana tugas eselon II yang dipimpin oleh seorang Direktur dan bertanggung jawab kepada Deputi Pemberantasan BNN.

Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional pasal 146,169-175 yaitu melaksanakan tugas Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Bidang Pemberantasan.

2. Fungsi

Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan sebagaimana yang tertuang Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan Kegiatan Operasional dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan program P4GN pada Direktorat Narkotika.
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Program Kegiatan Operasional Direktorat Narkotika dalam rangka pelaksanaan P4GN.
- c. Penyusunan Organisasi tugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional Pemutakhiran data Direktorat Narkotika .
- d. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Direktorat Narkotika.
- e. Pelaksanaan Kerjasama Nasional, regional dan internasional dalam rangka kegiatan operasional Direktorat Narkotika.
- f. Pemberantasan melalui Operasi Pemberantasan Narkotika Direktorat Narkotika dalam rangka pelaksanaan P4GN.
- g. Penyusunan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Operasional

D. PERAN STRATEGIS

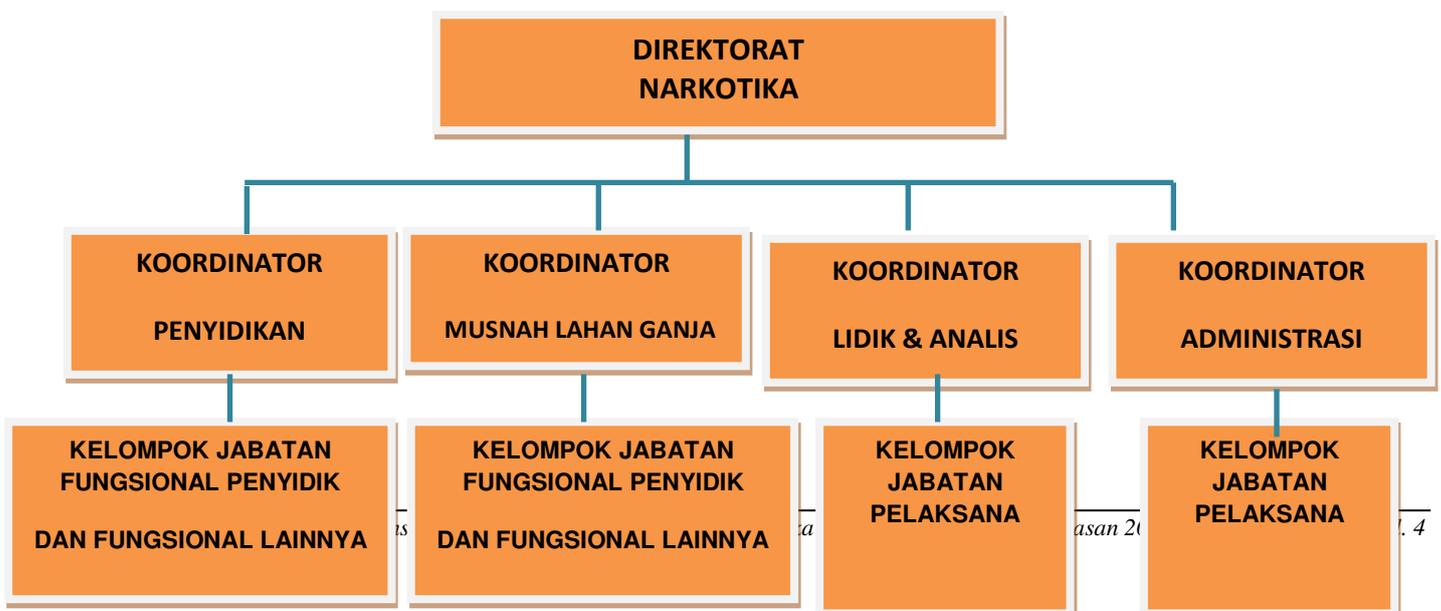
Sebagai representasi pemerintah dalam bidang P4GN sesuai dengan Tugas, Fungsi, dan Kewenangannya dalam hal penanganan permasalahan Jaringan narkoba, Pemetaan, Penyelidikan dan Pemusnahan lahan ganja dan Tanaman terlarang lainnya, peran strategis Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan adalah mengupayakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba secara profesional.

Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan sebagai *vocal point* dalam penanganan permasalahan narkoba baik alami maupun sintetis khususnya di bidang pemberantasan mempunyai strategi-strategi yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan P4GN antara lain Memberantas Sindikat Jaringan Narkotika Alami dan Narkotika Sintetis dan memetakan dan memusnahkan lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran kinerja Direktorat selanjutnya di Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan dibentuk Koordinator yang terdiri atas :

- a. Koordinator Penyidikan
- b. Koordinator Lahan Ganja
- c. Koordinator Lidik dan Analis
- d. Koordinator Administrasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional



Adapun tugas masing-masing koordinator dibawah Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinator Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- b. Koordinator Musnah Lahan Ganja mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan titik lokasi lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan.
- c. Koordinator Lidik dan analis melakukan kegiatan Penyelidikan dan analisis Jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- d. Koordinator Administrasi melakukan pengelolaan keuangan, data dan administrasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian koordinator yang sudah ditetapkan.

F. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Kedudukan dan Fungsi
 1. Kedudukan
 2. Fungsi
- D. Peran Strategi
- E. Struktur Organisasi
- F. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

- A. Perencanaan
 1. Visi
 2. Misi
 3. Sasaran Strategi
 4. Arah Kebijakan

- B. Penetapan Kinerja Direktorat Narkotika Direktorat Narkotika
Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
- B. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan. Perencanaan Kinerja juga merupakan tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis (Renstra) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada pencapaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan Renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional. Manfaat Perencanaan Kinerja salah satunya adalah menghubungkan perencanaan strategis, perencanaan tindakan, maupun perencanaan operasional secara rinci.

A. PERENCANAAN

Rencana Strategis merupakan penjabaran yang memuat visi, misi tujuan, sasaran strategi, target, kebijakan, serta program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMN 2020-2024. Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), bertujuan menurunkan tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba secara nasional, tujuan tersebut salah satu sasaran strategis yang terkandung didalam Rencana Strategis Direktorat Narkotika

Deputi Bidang Pemberantasan TA. 2023. Rencana Strategis Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan T.A. 2023 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023.

1. Visi

“Menjadi satuan kerja yang mampu menjalankan tugas pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika alami dan Narkotika Sintetis secara profesional.”

2. Misi

- a. Melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika Alami dan Narkotika Sintetis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Melakukan pembinaan serta pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika Alami dan Narkotika Sintetis agar berjalan secara profesional.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika Alami dan Narkotika Sintetis.

3. Sasaran Strategis

Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan memiliki sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan peredaran gelap narkotika alami maupun sintetis.
- b. Meningkatnya Pemusnahan lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya.

4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan adalah menurunkan prevalensi, menekan demand, dan memutus supply melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan Narkotika Alami dan Sintetis.

Strategi Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas penyelidikan, penyidikan, operasi terpadu, dan operasi mandiri yang berkoordinasi antar instansi terkait.

B. PENETAPAN KINERJA DIREKTORAT NARKOTIKA DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN TAHUN 2023

Penetapan Kinerja Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Penetapan Kinerja Direktorat Narkotika/BNNP Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis (Outcome) | Indikator Outcome | Target |
|----|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 607 Berkas |
| | Direktorat Narkotika (pusat) | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 30 Berkas |
| | BNNP Aceh | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 18 Berkas |
| | BNNP Sumut | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 45 Berkas |
| | BNNP Sumbar | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 22 Berkas |
| | BNNP Riau | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 25 Berkas |
| | BNNP Kepulauan Riau | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 16 Berkas |
| | BNNP Bangka Belitung | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 12 Berkas |
| | BNNP Jambi | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 20 Berkas |
| | BNNP Bengkulu | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 15 Berkas |

| | | | |
|----|---|--|-----------------|
| | BNNP Sumatera Selatan | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 20 Berkas |
| | BNNP Lampung | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 15 Berkas |
| | BNNP Jawa Barat | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 25 Berkas |
| | BNNP DKI Jakarta | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 16 Berkas |
| | BNNP Banten | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 14 Berkas |
| | BNNP DIY | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 15 Berkas |
| | BNNP Jawa Tengah | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 20 Berkas |
| | BNNP Jawa Timur | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 27 Berkas |
| | BNNP Kaltara | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 15 Berkas |
| | BNNP Kaltim | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 24 Berkas |
| | BNNP Kalbar | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 16 Berkas |
| | BNNP Kalsel | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 20 Berkas |
| | BNNP Kalteng | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 12 Berkas |
| | BNNP Bali | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 25 Berkas |
| | BNNP NTB | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 14 Berkas |
| | BNNP NTT | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 5 Berkas |
| | BNNP Sulut | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 15 Berkas |
| | BNNP Sultra | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 13 Berkas |
| | BNNP Sulteng | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 18 Berkas |
| | BNNP Sulsel | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 24 Berkas |
| | BNNP Gorontalo | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 10 Berkas |
| | BNNP Sulbar | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 12 Berkas |
| | BNNP Maluku | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 6 Berkas |
| | BNNP Maluku Utara | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 8 Berkas |
| | BNNP Papua | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 10 Berkas |
| | BNNP Papua Barat | Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 | 5 Berkas |
| 2. | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | 11 Titik Lokasi |
| | Direktorat Narkotika (Pusat) | Jumlah Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya | 6 Titik |
| | BNNP Nanggroe Aceh | Jumlah Titik Lokasi Lahan Ganja | 2 Titik |

| | | | |
|--|---------------------|---|---------|
| | Darussalam | dan Tanaman Terlarang Lainnya | |
| | BNNK Lhokseumawe | Jumlah Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya | 1 Titik |
| | BNNP Sumatera Utara | Jumlah Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman terlarang lainnya | 2 Titik |

Jumlah Anggaran :

Anggaran Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan Daerah/BNNP telah ditetapkan sebesar : ***Rp. 39,769,215,000 (Tigapuluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enampuluh Sembilan Juta Duaratus Lima Belas Ribu Rupiah).***

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan pada tahun 2023 dan setelah dilakukan 4 kali refocusing Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan mempunyai 2 Sasaran Strategis yang kemudian dijabarkan menjadi 3 Indikator Kinerja Utama (*output*). Ketiga indikator kinerja tersebut telah terealisasi dan bahkan capaiannya telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan Tahun 2023.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Berkas P-21 | Capaian (%) |
|----|---|---|-----------|------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1. | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | | | | | |
| | Direktorat Narkotika (Pusat) | Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21 | 30 Berkas | 31 Berkas | 30 Berkas | 100 % |
| | BNNP Aceh | Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21 | 18 Berkas | 64 Berkas | 43 Berkas | 239 % |
| | BNNP Sumut | Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21 | 45 Berkas | 113 Berkas | 97 Berkas | 216 % |
| | BNNP Sumbar | Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21 | 22 Berkas | 34 Berkas | 33 Berkas | 150 % |
| | BNNP Riau | Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21 | 25 Berkas | 44 Berkas | 37 Berkas | 148 % |
| | BNNP Kepulauan Riau | Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21 | 16 Berkas | 34 Berkas | 23 Berkas | 144 % |
| | BNNP Bangka Belitung | Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21 | 12 Berkas | 11 Berkas | 10 Berkas | 83% |
| | BNNP Jambi | Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21 | 20 Berkas | 59 Berkas | 46 Berkas | 230 % |
| | BNNP Bengkulu | Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana | 15 Berkas | 19 Berkas | 19 Berkas | 127 % |

| | | | | | | |
|------------------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Narkotika P21 | | | | |
| BNNP Sumsel | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 20 Berkas | 48 Berkas | 46 Berkas | 230 % |
| BNNP Lampung | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 15 Berkas | 17 Berkas | 16 Berkas | 107% |
| BNNP Jawa Barat | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 25 Berkas | 68 Berkas | 53 Berkas | 212 % |
| BNNP DKI Jakarta | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 16 Berkas | 33 Berkas | 25 Berkas | 156 % |
| BNNP Banten | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 14 Berkas | 22 Berkas | 17 Berkas | 121 % |
| BNNP DIY | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 15 Berkas | 21 Berkas | 25 Berkas | 167 % |
| BNNP Jawa Tengah | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 20 Berkas | 28 Berkas | 25 Berkas | 125 % |
| BNNP Jawa Timur | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 27 Berkas | 58 Berkas | 55 Berkas | 204 % |
| BNNP Kaltara | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 15 Berkas | 34 Berkas | 25 Berkas | 167 % |
| BNNP Kaltim | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 24 Berkas | 51 Berkas | 35 Berkas | 146 % |
| BNNP Kalbar | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 16 Berkas | 19 Berkas | 12 Berkas | 75 % |
| BNNP Kalsel | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 20 Berkas | 37 Berkas | 29 Berkas | 145 % |
| BNNP Kalteng | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 12 Berkas | 26 Berkas | 25 Berkas | 208 % |
| BNNP Bali | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 25 Berkas | 55 Berkas | 49 Berkas | 196 % |
| BNNP NTB | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 14 Berkas | 26 Berkas | 17 Berkas | 121 % |
| BNNP NTT | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 5 Berkas | 5 Berkas | 3 Berkas | 60% |
| BNNP Sulut | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 15 Berkas | 19 Berkas | 16 Berkas | 107% |
| BNNP Sultra | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 13 Berkas | 15 Berkas | 13 Berkas | 100 % |
| BNNP Sulteng | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 18 Berkas | 46 Berkas | 47 Berkas | 261 % |
| BNNP Sulsel | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 24 Berkas | 45 Berkas | 21 Berkas | 288 % |
| BNNP Gorontalo | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 10 Berkas | 14 Berkas | 14 Berkas | 140 % |
| BNNP Sulbar | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 12 Berkas | 25 Berkas | 24 Berkas | 200 % |
| BNNP Maluku | Jumlah Berkas Kasus Tindak Narkotika P21 | Perkara Pidana | 6 Berkas | 19 Berkas | 20 Berkas | 333 % |

| | | | | | | |
|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| | BNNP Maluku Utara | Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21 | 8 Berkas | 11 Berkas | 7 Berkas | 88% |
| | BNNP Papua | Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21 | 10 Berkas | 19 Berkas | 19 Berkas | 190 % |
| | BNNP Papua Barat | Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21 | 5 Berkas | 6 Berkas | 4 Berkas | 80 % |
| 2. | Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya | | | | | |
| | Pusat/Direktorat Narkotika | Jumlah Titik Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya | 6 Operasi | 6 Operasi | 20 Titik | 333 % |
| | BNNP Nanggroe Aceh Darussalam | Jumlah Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya | 2 Operasi | 3 Operasi | 3 Titik | 150 % |
| | BNNP Lhokseumawe | Jumlah Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya | 1 Operasi | 1 Operasi | 1 Titik | 100 % |
| | BNNP Sumatera Utara | Jumlah Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya | 2 Operasi | 3 Operasi | 3 Titik | 150 % |

Berdasarkan capaian indikator Kinerja Utama Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2023, sebagaimana Tabel 2 tersebut diatas, realisasi capaian rata-rata melebihi target output.

B. ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023.

Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi, selanjutnya capaiannya dipersentasikan, sehingga dapat diketahui bahwa target yang telah di tetapkan dapat dicapai atau tidak tercapai atau bahkan terlampaui.

Secara umum 2 (dua) sasaran strategis yang terjabarkan dalam 2 (dua) indikator kinerja utama Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan BNN Tahun Anggaran 2023 seluruh target yang telah ditetapkan realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Peningkatan tersebut disatu sisi dipengaruhi oleh semakin banyaknya orang yang berani mengambil risiko terlibat dalam peredaran gelap narkoba karena

motivasi mendapatkan uang dalam jumlah besar dan masih lemahnya penegakan hukum terhadap para tersangka.

Untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut di atas perlu dilakukan upaya-upaya menambah dan melengkapi peralatan IT, menambah atau meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan penegakan hukum atau menekan supply narkotika dan prekursor narkotika ilegal yang masuk ke Indonesia dan terutama dengan penambahan tenaga penyidik di BNN.

Di sisi lain, BNN dihadapkan pada keterbatasan sarana prasarana pendukung seperti: ruang tahanan (sebagian besar BNNP belum mempunyai ruang tahanan karena kantor masih berstatus kontrak, sehingga harus menitipkan tahanan ke kantor kepolisian setempat), peralatan teknologi belum tersedia, terutama di wilayah pelabuhan tidak resmi dan tidak terjaga (masih banyak jalur tikus yang ditenggarai peredaran gelap narkotika).

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sesuai Dokumen Penetapan Kinerja BNN Tahun Anggaran 2023, Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 39,769,215,000 (Tigapuluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enampuluh Sembilan Juta Duaratus Lima belas Ribu Rupiah).**

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung Kegiatan di Pusat/Direktorat Narkotika dan di Daerah/BNNP serta BNNK

Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan BNN menerima anggaran sebesar **Rp. 8.585.659.000,- (Delapan Milyar lima ratus delapan puluh lima juta**

enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) anggaran tersebut digunakan untuk mendukung 2 (dua) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi penggunaan anggaran Direktorat Narkotika Deputi Pemberantasan BNN tahun 2023.

| No. | Program /Kegiatan /Output/Suboutput/ komponen/Akun | Anggaran | Realisasi | Sisa | % |
|--------------------|---|---------------|---------------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika(Pusat / Direktorat Narkotika) | 5.680.300.000 | 5.629.378.617 | 50.921.383 | 99 % |
| 2. | Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya (Pusat / Direktorat Narkotika) | 2.905.359.000 | 2.904.846.682 | 512.318 | 100 % |
| Jumlah/% rata-rata | | 8.585.659.000 | 8.534.225.299 | 51.433.701 | 99 % |

Berdasarkan Realisasi Anggaran sebagaimana Tabel 3 tersebut diatas, Direktorat Narkotika pada Tahun Anggaran 2023 terdapat sisa/optimalisasi anggaran yang tidak diserap sebesar **Rp. 51.433.701,- (Lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus satu ribu rupiah)**

Kemudian Pagu Alokasi Anggaran untuk mendukung kegiatan Output (5354) berkas perkara tindak pidana narkotika dan titik lokasi lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya di daerah sebesar **Rp. 31.183.556.000,- (Tiga puluh satu milyar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).**

Adapun breakdown alokasi anggaran yang diberikan untuk Satker Daerah/
BNNP adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi penggunaan anggaran di Daerah/BNNP tahun 2023

| No. | Program /Kegiatan /Output/Suboutput/ komponen/Akun | Anggaran | Realisasi | Sisa | % |
|-----|---|---------------|---------------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika | | | | |
| 1. | BNNP Aceh (Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika) | 1.122.000.000 | 1.085.164.144 | 36.835.856 | 97 % |
| | Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya | 281.100.000 | 269.150.300 | 11.949.700 | 96 % |
| | Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya (Lhokseumawe) | 50.000.000 | 49.985.000 | 15.000 | 100 % |
| 2. | BNNP Sumut (Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika) | 1.994.845.000 | 1.970.655.406 | 24.189.594 | 99 % |
| | Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya | 360.856.000 | 357.327.500 | 3.528.500 | 99 % |
| 3. | BNNP Sumatera Barat | 995.485.000 | 991.060.673 | 4.397.327 | 100 % |

| | | | | | |
|-----|----------------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 4. | BNNP Riau | 1.042.200.000 | 1.038.401.000 | 3.799.000 | 100 % |
| 5. | BNNP Kepulauan Riau | 1.152.000.000 | 1.151.963.083 | 36.917 | 100 % |
| 6. | BNNP Bangka Belitung | 598.441.000 | 554.681.617 | 43.759.383 | 93% |
| 7. | BNNP Jambi | 799.055.000 | 799.040.000 | 15..000 | 100% |
| 8. | BNNP Bengkulu | 900.000.000 | 899.222.000 | 778.000 | 100% |
| 9. | BNNP Sumsel | 905.040.000 | 904.259.036 | 780. 964 | 100% |
| 10. | BNNP Lampung | 466.664.000 | 465.616.000 | 1.048.000 | 100% |
| 11. | BNNP Jabar | 1.182.080.000 | 1.181.506.000 | 574.000 | 100% |
| 12. | BNNP DKI | 649.995.000 | 649.938.479 | 56.521 | 100% |
| 13. | BNNP Banten | 728.243.000 | 728.243.000 | 0 | 100% |
| 14. | BNNP D.I.Yogyakarta | 697.457.000 | 697.121.600 | 335.400 | 100% |
| 15. | BNNP Jawa Tengah | 951.930.000 | 951.098.812 | 831.188 | 100% |
| 16. | BNNP Jawa Timur | 1.506.549.000 | 1.492.007.372 | 14.541.628 | 99% |

| | | | | | |
|-----|---------------------|---------------|---------------|------------|------|
| 17. | BNNP Kaltara | 754.161.000 | 746.988.585 | 7.172.415 | 99% |
| 18. | BNNP Kaltim | 1.179.727.000 | 1.178.910.012 | 816.988 | 100% |
| 19. | BNNP Kalbar | 1.025.000.000 | 1.022.604.000 | 2.396.000 | 100% |
| 20. | BNNP Kalsel | 1.147.850.000 | 1.146.387.759 | 1.462.241 | 100% |
| 21. | BNNP Kalteng | 519.398.000 | 517.791.389 | 1.606.611 | 100% |
| 22. | BNNP Bali | 1.300.000.000 | 1.259.796.682 | 40.203.318 | 97% |
| 23. | BNNP NTB | 741.300.000 | 731.837.630 | 9.462.370 | 99% |
| 24. | BNNP NTT | 416.246.000 | 411.230.360 | 5.015.640 | 99% |
| 25. | BNNP Sulawesi Utara | 968.905.000 | 912.496.500 | 56.408.500 | 94% |
| 26. | BNNP Sultra | 768.474.000 | 745.578.157 | 22.895.843 | 97% |
| 27. | BNNP Sulteng | 900.000.000 | 899.268.427 | 731.573 | 100% |
| 28. | BNNP Sulsel | 985.500.000 | 956.816.200 | 28.683.800 | 97% |
| 29. | BNNP Gorontalo | 650.000.000 | 645.127.667 | 4.872.333 | 99% |
| 30. | BNNP Sulbar | 854.500.000 | 854.400.300 | 100.000 | 100% |
| 31. | BNNP Maluku | 585.860.000 | 585.054.600 | 805.400 | 100% |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 32 | BNNP Maluku Utara | 678.000.000 | 648.000.000 | 30.000.000 | 96% |
| 33 | BNNP Papua | 920.722.000 | 918.942.600 | 1.779.400 | 100% |
| 34 | Papua Barat | 404.000.000 | 403.995.014 | 4.986 | 100% |
| Jumlah% rata-rata | | 31.183.556.000 | 30.821.665.937 | 361.890.063 | 98 % |

Berdasarkan Realisasi Anggaran sebagaimana Tabel 4 tersebut diatas, BNNP pada Tahun Anggaran 2023 terdapat sisa/optimalisasi anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. **361.890.063 (Tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilanpuluh ribu enam puluh tiga rupiah).**

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian tersebut di atas antara lain :

1. Setiap Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk mendukung kegiatan disusun sesuai dengan kebutuhan riil dilapangan sehingga tidak terjadi in-efisiensi penggunaan anggaran.
2. Penugasan personel diatur sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan ditunjuk sesuai dengan keahlian atau kompetensi masing-masing, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih efisien.
3. Pemanfaatan peralatan teknologi intelijen yang dimiliki BNN mampu mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan pengungkapan jaringan peredaran gelap

narkotika dan prekursor narkotika, sehingga anggaran yang digunakan untuk operasional lebih efisien.

4. Optimalisasi metode analisa data intelijen yang akurat dan efektifitas kerja anggota di lapangan terbukti berhasil meningkatkan kuantitas dan kualitas pengungkapan kejahatan narkotika.

Di tahun 2023 Anggaran sebesar **Rp. 39.769.215.000,- (Tigapuluh Sembilan Milyar Tujuh ratus enam puluh sembilan Juta Dua ratus lima belas ribu Rupiah)** dengan Realisasi **Rp. 39.355.891.236,- (Tiga puluh sembilan Milyar Tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah)** atau sebesar 99% dengan sisa anggaran yang tidak terserap **Rp. 361.890.063 (Tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilanpuluh ribu enam puluh tiga rupiah)**, dengan pencapaian kinerja ini menggambarkan tingkat akuntabilitas keuangan atau penggunaan anggaran pada Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan BNNP baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya inovasi dan terobosan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNN, khususnya dalam hal efisiensi penggunaan anggaran melalui penyusunan RAB yang akurat, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kemampuan dan kompetensi anggota yang ditugaskan di lapangan, pemanfaatan peralatan teknologi intelijen secara tepat dan optimalisasi metode analisa data intelijen serta mengefektifkan cara kerja anggota di lapangan.

D.IMPLEMENTASI E-MINDIK

Sebagai bentuk Akuntabilitas kinerja khususnya penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak Pidana

Pencucian Uang bersumber pada Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Direktorat Narkotika sebagai Pembina fungsi penyidikan berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh penyidik BNN. Aplikasi E-Mindik merupakan bagian dari Sistem Informasi Interdiksi Terpadu hal ini merupakan terobosan dalam efisiensi anggaran dan kegiatan dimana dalam membangun system digunakan sarana prasarana yang sudah ada. Pada bagian ini akan ditampilkan resume yang bersumber dari aplikasi E-Mindik periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Data Tersangka Berdasarkan LKN

| No | Jenis LKN | Jumlah Tersangka |
|--------------|-----------|------------------|
| 1 | Narkotika | 1304 |
| 2 | TPPU | 21 |
| Total | | 1325 |

Data Tersangka Berdasarkan Rentan Usia

| No | Rentan Usia | Jumlah Tersangka |
|--------------|-------------|------------------|
| 1 | <15 | 5 |
| 2 | 15-24 | 226 |
| 3 | 25-34 | 470 |
| 4 | 35-44 | 423 |
| 5 | 45-54 | 151 |
| 6 | 55-64 | 43 |
| 7 | >64 | 6 |
| Total | | 1324 |

Data Tersangka Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Tersangka |
|--------------|---------------|------------------|
| 1 | Laki-Laki | 1253 |
| 2 | Perempuan | 72 |
| Total | | 1325 |

Data Tersangka Berdasarkan Agama

| No | Agama | Jumlah Tersangka |
|--------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Islam | 1167 |
| 2 | Kristen | 85 |
| 3 | Katolik | 33 |
| 4 | Hindu | 25 |
| 5 | Budha | 13 |
| 6 | Khonghucu | 0 |
| 7 | Penghayat Kepercayaan | 0 |
| 8 | Lainnya | 2 |
| Total | | 1325 |

Data Tersangka Berdasarkan Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah Tersangka |
|----|----------------------------|------------------|
| 1 | Tidak Sekolah | 37 |
| 2 | Sekolah Dasar / Sederajat | 275 |
| 3 | Sekolah Menengah Pertama / | 322 |

| No | Pendidikan | Jumlah Tersangka |
|--------------|--|------------------|
| | Sederajat | |
| 4 | Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan / Sederajat | 599 |
| 5 | Akademi / Diploma | 22 |
| 6 | Diploma IV / Strata 1 | 66 |
| 7 | Strata 2 | 4 |
| Total | | 1325 |

Data Tersangka Berdasarkan Pekerjaan

| No | Pekerjaan | Jumlah Tersangka |
|----|-------------------------|------------------|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 260 |
| 2 | Peternak | 1 |
| 3 | Nelayan/Perikanan | 48 |
| 4 | Konstruksi | 1 |
| 5 | Transportasi | 1 |
| 6 | Karyawan Swasta | 235 |
| 7 | Karyawan Honorer | 12 |
| 8 | Buruh Harian Lepas | 100 |
| 9 | Mengurus Rumah Tangga | 40 |
| 10 | Buruh Tani/Perkebunan | 16 |
| 11 | Buruh Nelayan/Perikanan | 5 |
| 12 | Buruh Peternakan | 1 |
| 13 | Tukang Batu | 2 |
| 14 | Tukang Kayu | 5 |
| 15 | Pelajar/Mahasiswa | 114 |

| No | Pekerjaan | Jumlah Tersangka |
|--------------|----------------------------|------------------|
| 16 | Mekanik | 4 |
| 17 | Tukang Gigi | 1 |
| 18 | Seniman | 2 |
| 19 | Pensiun | 1 |
| 20 | Wartawan | 1 |
| 21 | Juru Masak | 1 |
| 22 | Pegawai Negeri Sipil | 4 |
| 23 | Tentara Nasional Indonesia | 4 |
| 24 | Guru | 3 |
| 25 | Arsitek | 1 |
| 26 | Kepolisian RI | 4 |
| 27 | Pelaut | 3 |
| 28 | Perdagangan | 8 |
| 29 | Sopir | 29 |
| 30 | Pedagang | 28 |
| 31 | Lainnya | 305 |
| 32 | Petani/Pekebun | 85 |
| Total | | 1325 |

Data Tersangka Berdasarkan Pekerjaan (Lainnya)

| No | Pekerjaan | Jumlah Tersangka |
|----|--------------------------------|------------------|
| 1 | | 1 |
| 2 | Buruh | 1 |
| 3 | Buruh (Tenaga Kerja Indonesia) | 1 |
| 4 | Buruh Bangunan | 1 |

| No | Pekerjaan | Jumlah Tersangka |
|----|---|------------------|
| 5 | Driver freelance | 1 |
| 6 | Freelance | 2 |
| 7 | Karyawan PT.Waskita bidang Konstruksi. | 1 |
| 8 | Karyawan Swasta | 1 |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 1 |
| 10 | Karyawan Toko Mainan | 1 |
| 11 | kuli bangunan | 1 |
| 12 | Mekanik | 1 |
| 13 | Model | 1 |
| 14 | Montir | 1 |
| 15 | Motoris Speed | 1 |
| 16 | NAPI lapas Klas II A Tarakan | 1 |
| 17 | narapidana | 2 |
| 18 | Narapidana | 1 |
| 19 | Narapidana (Narkotika) | 2 |
| 20 | Narapidana Lapas Kelas II A Gunung Sindur Bogor | 1 |
| 21 | Ojek Online | 1 |
| 22 | pelatih surfing | 1 |
| 23 | Pemandu Lagu | 1 |
| 24 | Pemandu Wisata | 1 |
| 25 | Pengemudi | 1 |
| 26 | Penjaga Tambak | 1 |
| 27 | Penjahit | 1 |
| 28 | Pensiunan Pegawai Negeri Sipil | 1 |

| No | Pekerjaan | Jumlah Tersangka |
|----|--|------------------|
| 29 | Petani Tambak | 2 |
| 30 | Petinju | 1 |
| 31 | Satpam | 1 |
| 32 | Serabutan | 1 |
| 33 | SOPIR | 2 |
| 34 | Sopir Pariwisata | 1 |
| 35 | SUPIR | 2 |
| 36 | Swasta | 8 |
| 37 | SWASTA | 1 |
| 38 | Swasta/driver | 2 |
| 39 | Technical/Engineering Lainnya | 1 |
| 40 | Tidak Ada / Narapidana Lapas Lubuk Pakam | 1 |
| 41 | Tidak Ada / Narapidana Lapas Tanjung Gusta | 1 |
| 42 | Warga Binaa Pemasarakatan | 1 |
| 43 | Warga Binaan | 3 |
| 44 | Warga Binaan Lapas Kelas II b Wonogiri | 1 |
| 45 | Warga Binaan Lapas Narkotika | 1 |
| 46 | Warga Binaan Lapas Tanjung Gusta | 1 |
| 47 | Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) | 1 |
| 48 | Warga Binaan Permasarakatan | 4 |
| 49 | Wiraswasata | 3 |
| 50 | wiraswasta | 21 |
| 51 | Wiraswasta | 169 |

| No | Pekerjaan | Jumlah Tersangka |
|--------------|-------------------|------------------|
| 52 | WIRASWASTA | 40 |
| 53 | Wiraswasta/Tukang | 1 |
| 54 | Wiraswata | 3 |
| 55 | Wirausaha | 1 |
| Total | | 305 |

Rekap Input LKN

| No. | Wilayah | LKN Disetujui |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 1 | Pusat - NAR | 16 |
| 2 | Pusat - P2 | 5 |
| 3 | Pusat - TPPU | 13 |
| 4 | Pusat - INTD | 31 |
| 5 | BNNP Aceh | 28 |
| 6 | 1) BNN Kabupaten Aceh Selatan | 0 |
| 7 | 2) BNN Kabupaten Aceh Tamiang | 11 |
| 8 | 3) BNN Kabupaten Bireuen | 1 |
| 9 | 4) BNN Kabupaten Pidie Jaya | 0 |
| 10 | 5) BNN Kabupaten Pidie | 1 |
| 11 | 6) BNN Kabupaten Gayo Lues | 0 |
| 12 | 7) BNN Kota Banda Aceh | 0 |
| 13 | 8) BNN Kota Lhokseumawe | 1 |
| 14 | 9) BNN Kota Langsa | 1 |
| 15 | 10) BNN Kota Sabang | 0 |
| 16 | BNNP Sumatera Utara | 26 |

| No. | Wilayah | LKN Disetujui |
|-----------|-------------------------------------|---------------|
| 17 | 1) BNN Kabupaten Asahan | 15 |
| 18 | 2) BNN Kabupaten Batu Bara | 12 |
| 19 | 3) BNN Kabupaten Deli Serdang | 5 |
| 20 | 4) BNN Kabupaten Karo | 4 |
| 21 | 5) BNN Kabupaten Labuhan Batu Utara | 1 |
| 22 | 6) BNN Kabupaten Langkat | 9 |
| 23 | 7) BNN Kabupaten Mandailing Natal | 2 |
| 24 | 8) BNN Kabupaten Serdang Bedagai | 7 |
| 25 | 9) BNN Kabupaten Simalungun | 3 |
| 26 | 10) BNN Kabupaten Tapanuli Selatan | 1 |
| 27 | 11) BNN Kota Binjai | 2 |
| 28 | 12) BNN Kota Gunungsitoli | 2 |
| 29 | 13) BNN Kota Pematang Siantar | 2 |
| 30 | 14) BNN Kota Tanjung Balai | 3 |
| 31 | 15) BNN Kota Tebing Tinggi | 3 |
| 32 | BNNP Sumatera Barat | 11 |
| 33 | 1) BNN Kabupaten Pasaman Barat | 2 |
| 34 | 2) BNN Kabupaten Solok | 2 |
| 35 | 3) BNN Kota Payakumbuh | 5 |
| 36 | 4) BNN Kota Sawahlunto | 3 |
| 37 | BNNP Sumatera Selatan | 20 |
| 38 | 1) BNN Kabupaten Empat Lawang | 1 |
| 39 | 2) BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir | 2 |
| 40 | 3) BNN Kabupaten Muara Enim | 3 |

| No. | Wilayah | LKN Disetujui |
|------------|--|----------------------|
| 41 | 4) BNN Kabupaten Musi Rawas | 3 |
| 42 | 5) BNN Kabupaten Ogan Ilir | 0 |
| 43 | 6) BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 1 |
| 44 | 7) BNN Kota Lubuk Linggau | 1 |
| 45 | 8) BNN Kota Pagar Alam | 1 |
| 46 | 9) BNN Kota Prabumulih | 3 |
| 47 | BNNP Bengkulu | 19 |
| 48 | 1) BNN Kabupaten Bengkulu Selatan | 0 |
| 49 | 2) BNN Kota Bengkulu | 3 |
| 50 | BNNP Jambi | 21 |
| 51 | 1) BNN Kabupaten Batang Hari | 4 |
| 52 | 2) BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 0 |
| 53 | 3) BNN Kota Jambi | 4 |
| 54 | BNNP Riau | 14 |
| 55 | 1) BNN Kabupaten Kuantan Singingi | 1 |
| 56 | 2) BNN Kabupaten Pelalawan | 2 |
| 57 | 3) BNN Kota Dumai | 3 |
| 58 | 4) BNN Kota Pekanbaru | 4 |
| 59 | BNNP Kepulauan Riau | 30 |
| 60 | 1) BNN Kabupaten Karimun | 0 |
| 61 | 2) BNN Kota Batam | 0 |
| 62 | 3) BNN Kota Tanjung Pinang | 0 |
| 63 | BNNP Bangka Belitung | 9 |
| 64 | 1) BNN Kabupaten Bangka Selatan | 0 |

| No. | Wilayah | LKN Disetujui |
|-----------|----------------------------------|---------------|
| 65 | 2) BNN Kabupaten Bangka | 0 |
| 66 | 3) BNN Kabupaten Belitung | 0 |
| 67 | 4) BNN Kota Pangkal Pinang | 2 |
| 68 | BNNP Lampung | 12 |
| 69 | 1) BNN Kabupaten Lampung Timur | 0 |
| 70 | 2) BNN Kabupaten Lampung Selatan | 0 |
| 71 | 3) BNN Kabupaten Tanggamus | 0 |
| 72 | 4) BNN Kabupaten Way Kanan | 0 |
| 73 | 5) BNN Kota Metro | 0 |
| 74 | BNNP Banten | 10 |
| 75 | 1) BNN Kota Cilegon | 1 |
| 76 | 2) BNN Kota Tangerang Selatan | 3 |
| 77 | 3) BNN Kota Tangerang | 1 |
| 78 | BNNP DKI Jakarta | 20 |
| 79 | 1) BNN Kota Jakarta Selatan | 2 |
| 80 | 2) BNN Kota Jakarta Timur | 2 |
| 81 | 3) BNN Kota Jakarta Utara | 3 |
| 82 | BNNP Jawa Barat | 27 |
| 83 | 1) BNN Kota Cimahi | 0 |
| 84 | 2) BNN Kabupaten Kuningan | 1 |
| 85 | 3) BNN Kota Bandung | 1 |
| 86 | 4) BNN Kota Cirebon | 3 |
| 87 | 5) BNN Kota Depok | 2 |
| 88 | 6) BNN Kota Tasikmalaya | 0 |

| No. | Wilayah | LKN Disetujui |
|------------|--------------------------------|---------------|
| 89 | 7) BNN Kabupaten Bandung Barat | 1 |
| 90 | 8) BNN Kabupaten Bogor | 6 |
| 91 | 9) BNN Kabupaten Ciamis | 1 |
| 92 | 10) BNN Kabupaten Cianjur | 0 |
| 93 | 11) BNN Kabupaten Garut | 2 |
| 94 | 12) BNN Kabupaten Karawang | 4 |
| 95 | 13) BNN Kabupaten Sukabumi | 1 |
| 96 | 14) BNN Kabupaten Sumedang | 3 |
| 97 | BNNP Jawa Tengah | 9 |
| 98 | 1) BNN Kabupaten Batang | 1 |
| 99 | 2) BNN Kabupaten Banyumas | 3 |
| 100 | 3) BNN Kabupaten Cilacap | 1 |
| 101 | 4) BNN Kabupaten Kendal | 1 |
| 102 | 5) BNN Kabupaten Magelang | 1 |
| 103 | 6) BNN Kabupaten Purbalingga | 1 |
| 104 | 7) BNN Kabupaten Temanggung | 1 |
| 105 | 8) BNN Kota Surakarta | 1 |
| 106 | 9) BNN Kota Tegal | 1 |
| 107 | BNNP D.I Yogyakarta | 14 |
| 108 | 1) BNN Kabupaten Bantul | 1 |
| 109 | 2) BNN Kabupaten Sleman | 2 |
| 110 | 3) BNN Kota Yogyakarta | 1 |
| 111 | BNNP Jawa Timur | 12 |
| 112 | 1) BNN Kabupaten Sidoarjo | 2 |

| No. | Wilayah | LKN Disetujui |
|------------|---------------------------------|---------------|
| 113 | 2) BNN Kabupaten Sumenep | 4 |
| 114 | 3) BNN Kabupaten Tulungagung | 2 |
| 115 | 4) BNN Kabupaten Trenggalek | 1 |
| 116 | 5) BNN Kabupaten Tuban | 4 |
| 117 | 6) BNN Kota Batu | 2 |
| 118 | 7) BNN Kota Kediri | 1 |
| 119 | 8) BNN Kota Malang | 6 |
| 120 | 9) BNN Kota Mojokerto | 6 |
| 121 | 10) BNN Kota Surabaya | 5 |
| 122 | 11) BNN Kabupaten Blitar | 3 |
| 123 | 12) BNN Kabupaten Gresik | 5 |
| 124 | 13) BNN Kabupaten Kediri | 2 |
| 125 | 14) BNN Kabupaten Lumajang | 0 |
| 126 | 15) BNN Kabupaten Malang | 1 |
| 127 | 16) BNN Kabupaten Nganjuk | 2 |
| 128 | 17) BNN Kabupaten Pasuruan | 1 |
| 129 | BNNP Bali | 38 |
| 130 | 1) BNN Kabupaten Badung | 6 |
| 131 | 2) BNN Kabupaten Buleleng | 1 |
| 132 | 3) BNN Kabupaten Gianyar | 2 |
| 133 | 4) BNN Kabupaten Karangasem | 0 |
| 134 | 5) BNN Kabupaten Klungkung | 1 |
| 135 | 6) BNN Kota Denpasar | 3 |
| 136 | BNNP Nusa Tenggara Timur | 5 |

| No. | Wilayah | LKN Disetujui |
|------------|--------------------------------------|---------------|
| 137 | 1) BNN Kabupaten Belu | 0 |
| 138 | 2) BNN Kabupaten Rote Ndao | 0 |
| 139 | 3) BNN Kota Kupang | 0 |
| 140 | BNNP Nusa Tenggara Barat | 18 |
| 141 | 1) BNN Kabupaten Sumbawa | 0 |
| 142 | 2) BNN Kabupaten Sumbawa Barat | 0 |
| 143 | 3) BNN Kabupaten Bima | 0 |
| 144 | 4) BNN Kota Mataram | 0 |
| 145 | BNNP Kalimantan Selatan | 16 |
| 146 | 1) BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 2 |
| 147 | 2) BNN Kabupaten Barito Kuala | 1 |
| 148 | 3) BNN Kabupaten Balangan | 2 |
| 149 | 4) BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara | 3 |
| 150 | 5) BNN Kabupaten Tanah Laut | 1 |
| 151 | 6) BNN Kabupaten Tabalong | 4 |
| 152 | 7) BNN Kota Banjarmasin | 3 |
| 153 | 8) BNN Kota Banjar Baru | 4 |
| 154 | BNNP Kalimantan Barat | 14 |
| 155 | 1) BNN Kabupaten Bengkayang | 0 |
| 156 | 2) BNN Kabupaten Kubu Raya | 0 |
| 157 | 3) BNN Kabupaten Mempawah | 0 |
| 158 | 4) BNN Kabupaten Sintang | 0 |
| 159 | 5) BNN Kabupaten Sanggau | 0 |
| 160 | 6) BNN Kota Pontianak | 0 |

| No. | Wilayah | LKN Disetujui |
|-----|-------------------------------------|---------------|
| 161 | 7) BNN Kota Singkawang | 0 |
| 162 | BNNP Kalimantan Timur | 18 |
| 163 | 1) BNN Kota Balikpapan | 8 |
| 164 | 2) BNN Kota Bontang | 3 |
| 165 | 3) BNN Kota Samarinda | 9 |
| 166 | BNNP Kalimantan Tengah | 11 |
| 167 | 1) BNN Kabupaten Kotawaringin Barat | 2 |
| 168 | 2) BNN Kota Palangka Raya | 1 |
| 169 | BNNP Kalimantan Utara | 15 |
| 170 | 1) BNN Kota Nunukan | 3 |
| 171 | 2) BNN Kota Tarakan | 8 |
| 172 | BNNP Sulawesi Selatan | 21 |
| 173 | 1) BNN Kabupaten Bone | 2 |
| 174 | 2) BNN Kabupaten Tana Toraja | 4 |
| 175 | 3) BNN Kota Palopo | 4 |
| 176 | BNNP Sulawesi Tengah | 19 |
| 177 | 1) BNN Kabupaten Banggai Kepulauan | 1 |
| 178 | 2) BNN Kabupaten Donggala | 4 |
| 179 | 3) BNN Kabupaten Morowali | 6 |
| 180 | 4) BNN Kabupaten Poso | 3 |
| 181 | 5) BNN Kabupaten Tojo Una-Una | 1 |
| 182 | 6) BNN Kota Palu | 4 |
| 183 | BNNP Sulawesi Tenggara | 7 |
| 184 | 1) BNN Kabupaten Kolaka | 2 |

| No. | Wilayah | LKN Disetujui |
|-----|------------------------------------|---------------|
| 185 | 2) BNN Kabupaten Muna | 1 |
| 186 | 3) BNN Kota Baubau | 2 |
| 187 | 4) BNN Kota Kendari | 1 |
| 188 | BNNP Sulawesi Barat | 7 |
| 189 | 1) BNN Kabupaten Polewali Mandar | 11 |
| 190 | BNNP Sulawesi Utara | 9 |
| 191 | 1) BNN Kabupaten Bolaang Mongondow | 1 |
| 192 | 2) BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe | 0 |
| 193 | 3) BNN Kota Bitung | 1 |
| 194 | 4) BNN Kota Manado | 1 |
| 195 | BNNP Gorontalo | 12 |
| 196 | 1) BNN Kabupaten Boalemo | 0 |
| 197 | 2) BNN Kabupaten Bone Bolango | 0 |
| 198 | 3) BNN Kabupaten Gorontalo | 0 |
| 199 | 4) BNN Kabupaten Gorontalo Utara | 0 |
| 200 | 5) BNN Kota Gorontalo | 0 |
| 201 | BNNP Maluku | 9 |
| 202 | 1) BNN Kabupaten Buru Selatan | 0 |
| 203 | 2) BNN Kota Tual | 0 |
| 204 | BNNP Maluku Utara | 8 |
| 205 | 1) BNN Kabupaten Pulau Morotai | 0 |
| 206 | 2) BNN Kabupaten Halmahera Utara | 0 |
| 207 | 3) BNN Kota Tidore Kepulauan | 0 |
| 208 | BNNP Papua | 9 |

| No. | Wilayah | LKN Disetujui |
|-----|---------------------------|---------------|
| 209 | 1) BNN Kabupaten Mimika | 2 |
| 210 | 2) BNN Kabupaten Jayapura | 4 |
| 211 | BNNP Papua Barat | 4 |
| 212 | Total | 944 |

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

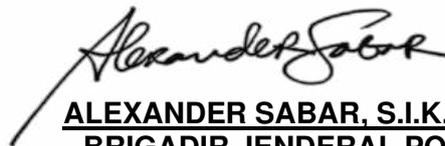
Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum target kinerja Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan BNNP Tahun 2023 dapat tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, Pencapaian ini dipengaruhi oleh:
 - a. Efisiensi Penggunaan anggaran.
 - b. Efektifitas pelaksanaan tugas oleh anggota di lapangan.
 - c. Optimalnya dukungan teknologi intelijen dan human intelijen.
 - d. Optimalisasi metode analisa data intelijen dan mensinergikan sumber daya yang ada di masing-masing Direktorat.
 - e. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara BNN dengan Instansi terkait baik nasional, regional maupun Internasional.

2. Walaupun akuntabilitas kinerja Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan dan BNNP berhasil melebihi target yang telah ditetapkan namun masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan capaian tersebut, antara lain:
 - a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyidik, penyidik, dan analis intelijen melalui pendidikan dan latihan di dalam maupun di luar negeri.

- b. Menambah dan melengkapi peralatan intelijen untuk mengimbangi modus operandi yang berkembang.
- c. Perlu penambahan alokasi anggaran untuk mendukung pengadaan, perawatan, dan pemeliharaan peralatan penyelidikan dan penyidikan.
- d. Mengoptimalkan sistem analisa data intelijen yang sudah ada untuk mendukung keakurasian penentuan dan penetapan target operasi serta penentuan cara bertindak dilapangan.
- e. Mengoptimalkan penelusuran dan penyitaan aset para pelaku kejahatan narkoba dalam rangka menghentikan aktifitas peredaran gelap narkoba.

**DIREKTUR NARKOTIKA
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN**



ALEXANDER SABAR, S.I.K, M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

L A M P I R A N